CAKUPAN MATERI UJI KOMPETENSI PERPAJAKAN

Tingkat A

No	Mata Ujian	Materi
1	Bea Meterai	1. Objek, Tarif, Saat Terutang, dan Pihak Yang Terutang Bea Meterai dan pengecualiannya 2. Pemungut Bea Meterai 3. Tata Cara Pembayaran Meterai 4. Sanksi administrasi maupun pidana dalam Bea Meterai
2	KUP, PPSP, PP	1. NPWP / Pengukuhan PKP 2. Pembayaran dan pelaporan pajak 3. STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT) 4. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) 5. Permohonan Pembetulan, Keberatan dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 6. Gugatan Banding di Pengadilan Pajak, Pengajuan PK ke MA 7. Pencatatan dan Pembukuan 8. Penelitian, pemeriksaan dan penyidikan 9. Sanksi-sanksi 10. Restitusi 11. Ketentuan Pidana
3	PPh OP	1. Yang menjadi Subjek Pajak Orang Pribadi termasuk WBT (Warisan Belum Terbagi) dan Subjek Pajak DN dan Subjek Pajak LN Orang Pribadi 2. Saat dimulai dan berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif Orang Pribadi termasuk WBT (Warisan Belum Terbagi) 3. Pihak yang Dikecualikan Subjek Pajak Orang Pribadi (Pasal 3 UU PPh) 4. Objek Pajak Orang Pribadi dan Penghasilan yang Dikenakan Pajak 5. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final termasuk PPh Final bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 6. Penghasilan Orang Pribadi yang Dikecualikan dari Objek Pajak 7. Biaya-biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan 8. Norma Penghitungan Penghasilan Neto 9. Pemajakan atas Penghasilan Keluarga 10. Kompensasi Kerugian 11. PTKP, Tarif, dan Penghitungan PPh Terutang Orang Pribadi 12. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Penyesuaian Fiskal Orang Pribadi 13. Pelunasan Pajak Tahun Berjalan dan Kredit Pajak Orang Pribadi 14. Penghitungan Pajak Akhir Tahun dan Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi 15. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
4	PPh Pot/Put	1. Pemotong PPh 21 dan pengecualiannya 2. Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh 21 dan pengecualiannya 3. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21 dan pengecualiannya

No	Mata Ujian	Materi
		4. Mekanisme pemotongan/pemungutan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan a. Pemberian bingkisan (hari raya dan selainnya) b. Fasilitas kerja dari pemberi kerja c. Fasilitas tempat tinggal untuk individu d. Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja" 5. Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan 6. Tarif, dasar pengenaan, pajak dan penerapannya 7. Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas: a. Penghasilan bruto teratur b. Penghasilan bruto tidak teratur c. Penghitungan Pasal 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang tidak kehilangan kewajiban subjektif d. Penghitungan Pasal 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang kehilangan kewajiban subjektif e. Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi f. Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja g. Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja" 8. Hak dan kewajiban pemotong pajak 9. Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak 10. PPh 21 yang bersifat final (sebagai penerima) a. Pesangon yang dibayarkan sekaligus b. Tunjangan/jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus 11. Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan 12. Pengertian pemotongan secara umum (semua pasal) 13. Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh Pasal 23 14. Pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 23 15. Objek pemotongan, Siapa yang wajib memotong, Dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) 16. Pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) 17. Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) 18. Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh Pasal 26 19. Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 26
5	PPN dan SPT PPN	1. Pengertian Dasar PPN, Karakteristik PPN, Mekanisme PPN 2. Kewajiban PKP: a. Batasan Pengusaha Kecil b. Kewajiban Pelaporan Usaha c. Pemungutan d. Penyetoran e. Pelaporan 3. Objek PPN: a. Penyerahan di dalam Daerah Pabean atas: 1) BKP dan non-BKP 2) JKP dan non-JKP 3) Kegiatan usaha / pekerjaan b. Impor BKP berwujud dan nonBKP berwujud

No	Mata Ujian	Materi
		c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean d. Ekspor 1) BKP berwujud dan nonBKP berwujud 2) BKP tidak berwujud dan nonBKP tidak berwujud 3) JKP dan nonJKP e. Kegiatan membangun sendiri f. Penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan 4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif: a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 1) Harga jual 2) Nilai penggantian 3) Nilai impor/ekspor 4) Nilai lain b. Tarif PPN 1) 0% ekspor 2) 12% 3) Besaran tertentu 5. Faktur Pajak: a. Fungsi Faktur Pajak b. Tata cara pengisian Faktur Pajak c. Ketentuan formal dan material Faktur Pajak d. Saat pembuatan Faktur Pajak e. Tata cara penggantian dan pembatalan faktur pajak serta pembetulan SPT f. Faktur Pajak tidak lengkap g. Nota Retur dan Nota Pembatalan 6. Pengkreditan Pajak Masukan: a. Prinsip dasar b. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama c. Kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan d. Kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan 7. Pemungut PPN a. Objek pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemungut PPN b. Kewajiban PKP Rekanan c. Kewajiban Pemungut PPN 8. Pengisian SPT Masa PPN oleh PKP Orang Pribadi 9. Fasilitas: a. PPN tidak dipungut b. Dibebaskan dari pengenaan PPN

Tingkat B

No	Mata Ujian	Subjek	Materi
1	Akuntansi Perpajakan	Badan Dalam Negeri	1. Jurnal hak dan kewajiban perpajakan (PPh Pot Put: Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 4 ayat 2) 2. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk Piutang, Persediaan, Biaya Dibayar di Muka, Aktiva Tetap, Aktiva Tetap Tidak Berwujud, Kewajiban dan Ekuitas 3. Akuntansi Organisasi Nirlaba 4. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan biaya yang meliputi: Usaha, dan Di luar usaha 5. Rekonsiliasi Fiskal dan Jurnal Penghitungan PPh Badan
2	Bea Meterai	Orang Pribadi	Objek, Tarif, Saat Terutang, dan Pihak Yang Terutang Bea Meterai dan pengecualiannya
3	KUP, PPSP, PP	Badan Dalam Negeri	1. NPWP / Pengukuhan PKP 2. Pembayaran, pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak 3. STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT) 4. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) 5. Permohonan Pembetulan, Keberatan dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 6. Gugatan Banding di Pengadilan Pajak, Pengajuan PK ke MA 7. Pembukuan 8. Penelitian, pemeriksaan dan penyidikan 9. Sanksi-sanksi 10. Restitusi 11. Ketentuan Pidana
		Orang Pribadi	Pencatatan dan Pembukuan
4	PBB-P5L	Badan Dalam Negeri	1. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan klasifikasi objek pajak 2. Subjek dan Objek Pajak yang dikecualikan/tidak dikenakan PBB 3. Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak 4. Penetapan NJOP (Penilaian, Tahun Pajak dan saat terutang pajak) 5. Pengenaan PBB (NJOPTKP, NJKP, Tarif, PBB Terutang) 6. Ketetapan dan Penagihan Pajak (SPPT, SKP PBB, STP PBB) 7. Upaya Hukum PBB (Keberatan, Gugatan, Banding, Peninjauan Kembali) 8. Upaya Hukum non keberatan (Pembetulan, Pengurangan PBB, Pengurangan Denda Administrasi PBB, Pembatalan SPPT, SKP PBB, dan STP PBB yang tidak benar)

No	Mata Ujian	Subjek	Materi
5	PPh OP	Orang Pribadi	1. Norma Penghitungan Penghasilan Neto 2. Pemajakan atas Penghasilan Keluarga 3. PTKP, Tarif, dan Penghitungan PPh Terutang Orang Pribadi
6	PPh Pot/Put	Badan Dalam Negeri	1. Pemotong PPh 21 dan pengecualiannya 2. Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh 21 dan pengecualiannya 3. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21 dan pengecualiannya 4. Mekanisme pemotongan/pemungutan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan a. Pemberian bingkisan (hari raya dan selainnya) b. Fasilitas kerja dari pemberi kerja c. Fasilitas tempat tinggal untuk individu d. Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja 5. Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan 6. Tarif, dasar pengenaan pajak, dan penerapannya 7. Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas: a. Penghasilan bruto teratur b. Penghasilan bruto tidak teratur c. Penghitungan Pasal 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang tidak kehilangan kewajiban subjektif d. Penghitungan Pasal 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang kehilangan kewajiban subjektif e. Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi f. Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja g. Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja" 8. Hak dan kewajiban pemotong pajak 9. PPh 21 yang bersifat final: a. Pesangon yang dibayarkan sekaligus b. Tunjangan/jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus 10. Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan (semua pasal) 11. Pengisian SPT PPh Pasal 21 12. Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, Dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh Pasal 22 13. Pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 22 14. PPh Pasal 22 Final 15. Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh Pasal 23 16. Pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 23 17. Objek pemotongan, Siapa yang wajib memotong, Dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) 18. Pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)

No	Mata Ujian	Subjek	Materi
			19. Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh Pasal 26 20. Pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 26
		Orang Pribadi	1. Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas: a. Penghasilan bruto teratur b. Penghasilan bruto tidak teratur c. Penghitungan Pasal 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang tidak kehilangan kewajiban subjektif d. Penghitungan Pasal 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang kehilangan kewajiban subjektif e. Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi f. Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja g. Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja 2. Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak 3. Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2)
7	PPh Badan	Badan Dalam Negeri	1. Yang menjadi Subjek Pajak DN dan Subjek Pajak LN 2. Saat dimulai dan berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif Badan 3. Pihak yang Dikecualikan Subjek Pajak Badan 4. Objek Pajak Badan, Penghasilan yang Dikenakan Pajak, dan Penghasilan Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap 5. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Badan termasuk PPh Final bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 6. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Badan 7. Biaya-biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan Badan 8. Harga Perolehan dan Pengalihan Harta, Penilaian dan Pemakaian Persediaan 9. Hubungan Istimewa 10. Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 11. Kompensasi Kerugian 12. Perhitungan PTKP, Tarif, dan PPh Terutang Badan 13. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Penyesuaian Fiskal Badan 14. Pelunasan Pajak Tahun Berjalan dan Kredit Pajak Badan 15. Penghitungan Pajak Akhir Tahun dan Angsuran PPh Pasal 25 Badan 16. Fasilitas selain Pasal 31 E (non-PMA dan BUT) 17. SPT Tahunan PPh Badan
8	PPN dan SPT PPN	Badan Dalam Negeri	1. Pengertian Dasar PPN, Karakteristik PPN, Mekanisme PPN 2. Kewajiban PKP: a. Batasan Pengusaha Kecil

No	Mata Ujian	Subjek	Materi
			b. Kewajiban Pelaporan Usaha c. Pemungutan d. Penyetoran e. Pelaporan 3. Objek PPN: a. Penyerahan di dalam Daerah Pabean atas: 4) BKP dan non-BKP 5) JKP dan non-JKP 6) Kegiatan usaha / pekerjaan b. Impor BKP berwujud dan nonBKP berwujud c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean d. Ekspor 4) BKP berwujud dan nonBKP berwujud 5) BKP tidak berwujud dan nonBKP tidak berwujud 6) JKP dan nonJKP e. Kegiatan membangun sendiri f. Penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan 4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif: a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 1) Harga jual 2) Nilai penggantian 3) Nilai impor/ekspor 4) Nilai lain b. Tarif PPN 1) 0% ekspor 2) 12% 3) Besaran tertentu 5. Faktur Pajak: a. Fungsi Faktur Pajak b. Tata cara pengisian Faktur Pajak c. Ketentuan formal dan material Faktur Pajak d. Saat pembuatan Faktur Pajak e. Tata cara penggantian dan pembatalan faktur pajak serta pembetulan SPT f. Faktur Pajak tidak lengkap g. Nota Retur dan Nota Pembatalan 6. Pengkreditan Pajak Masukan: a. Prinsip dasar b. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama c. Kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan d. Kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan 7. Pemungut PPN a. Objek pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemungut PPN b. Kewajiban PKP Rekanan c. Kewajiban Pemungut PPN 8. Pengisian SPT Masa PPN oleh PKP Orang Pribadi 9. Fasilitas:

No	Mata Ujian	Subjek	Materi
			a. PPN tidak dipungut b. Dibebaskan dari pengenaan PPN
		Orang Pribadi	1. Kewajiban PKP: a. Batasan Pengusaha Kecil b. Kewajiban Pelaporan Usaha c. Pemungutan d. Penyetoran e. Pelaporan 2. Objek PPN: a. Penyerahan di dalam Daerah Pabean atas: 1) BKP dan non-BKP 2) JKP dan non-JKP 3) Kegiatan usaha / pekerjaan b. Impor BKP berwujud dan nonBKP berwujud c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean d. Ekspor 1) BKP berwujud dan nonBKP berwujud 2) BKP tidak berwujud dan nonBKP tidak berwujud 3) JKP dan nonJKP e. Kegiatan membangun sendiri f. Penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

TINGKAT C

No	Mata Ujian	Subjek	Materi
1	Akuntansi Perpajakan	Badan Dalam Negeri	1. Jurnal hak dan kewajiban perpajakan (PPh Pot Put: Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 4 ayat 2) 2. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk Piutang, Persediaan, Biaya Dibayar Dimuka, Aktiva Tetap, Aktiva Tetap Tidak Berwujud, Kewajiban dan Ekuitas 3. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan biaya yang meliputi: Usaha, dan Di luar usaha 4. Rekonsiliasi Fiskal dan Jurnal Penghitungan PPh Badan
		Transaksi Internasional	1. Jurnal hak dan kewajiban perpajakan (PPh Pot Put: Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 4 ayat 2) 2. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk Piutang, Persediaan, Biaya Dibayar Dimuka, Aktiva Tetap, Aktiva Tetap Tidak Berwujud, Kewajiban dan Ekuitas 3. Akuntansi Organisasi Nirlaba 4. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan biaya yang meliputi: Usaha, dan Di luar usaha 5. Rekonsiliasi Fiskal dan Jurnal Penghitungan PPh Badan 6. Akuntansi Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank 7. Akuntansi Jasa Kontruksi 8. Akuntansi Merger (Penggabungan), Acquisitions (Akuisisi) dan Consolidations (Konsolidasi), Liquidation (Likuidasi) 9. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan biaya yang meliputi: Usaha dan Di luar usaha 10. Hubungan Laporan Keuangan Fiskal dengan Laporan Keuangan Komersial
2	Bea Meterai	Orang Pribadi	Objek, Tarif, Saat Terutang, dan Pihak Yang Terutang Bea Meterai dan pengecualiannya
3	KUP, PPSP, PP	Badan Dalam Negeri	1. STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT) 2. Permohonan Pembetulan, Keberatan dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 3. Sanksi-sanksi 4. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
		Orang Pribadi	STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT)

No	Mata Ujian	Subjek	Materi
4	Pajak Internasional	Transaksi Internasional	1. Pengertian Perpajakan Internasional 2. Ruang lingkup Perpajakan Internasional a. Pemajakan WP Dalam Negeri atas penghasilan dari luar negeri b. Pemajakan WP Luar Negeri atas penghasilan dari dalam negeri c. Beberapa pengertian khusus 3. P3B a. Pengertian P3B b. Tie Breaker Rule c. Pengertian BUT d. Jenis BUT e. Pengecualian BUT f. Hak Pemajakan Penuh g. Hak Pemajakan Terbatas h. Pelepasan Hak Pemajakan i. Ketentuan Khusus dalam P3B 4. Metode Penghindaran Pajak Berganda 5. Anti-Avoidance Measures (Anti Penghindaran Pajak) a. Controlled Foreign Cooperation Rules b. Thin Capitalization Rules c. Treaty Shopping d. Transfer Pricing (PKKU) 6. Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Docs) 7. Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional a. Prosedur Persetujuan Bersama (MAP) b. Kesepakatan Harga Transfer (APA)" 8. Transparansi dan Kerjasama Perpajakan Internasional a. Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional (Exchange of Information) 1) Automatic Exchange of Information (Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional secara Otomatis atas Rekening Keuangan, Aset Kripto, CBCR, dan GIR) 2) Exchange of Information by Request (Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional berdasarkan Permintaan) b. Bantuan Penagihan Pajak (Assistance in Collection)
5	PBB-P5L	Badan Dalam Negeri	1. Subjek dan Objek Pajak yang dikecualikan/tidak dikenakan PBB 2. Pengenaan PBB (NJOPTKP, NJKP, Tarif, PBB Terutang) 3. Upaya Hukum non keberatan (Pembetulan, Pengurangan PBB, Pengurangan Denda Administrasi PBB, Pembatalan SPPT, SKP PBB, dan STP PBB yang tidak benar)

No	Mata Ujian	Subjek	Materi
6	PPh Badan	Badan Dalam Negeri	1. Objek Pajak Badan, Penghasilan yang Dikenakan Pajak, dan Penghasilan Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap 2. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Badan 3. Biaya-biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan Badan 4. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Penyesuaian Fiskal Badan
		Transaksi Internasional	1. Yang menjadi Subjek Pajak (transaksi Internasional) dan Subjek Pajak DN dan Subjek Pajak LN (transaksi Internasional) 2. Saat dimulai dan berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif 3. Pihak yang Dikecualikan Subjek Pajak 4. Objek Pajak, Penghasilan yang Dikenakan Pajak, dan Penghasilan Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap 5. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final 6. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak 7. Biaya-biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan 8. Harga Perolehan dan Pengalihan Harta, Penilaian dan Pemakaian Persediaan 9. Hubungan Istimewa 10. Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 11. Kompensasi Kerugian 12. Penghitungan PTKP, Tarif, dan PPh Terutang 13. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Penyesuaian Fiskal 14. Tarif Pajak (termasuk Fasilitas Pasal 31 E) 15. Pelunasan Pajak Tahun Berjalan dan Kredit Pajak 16. Tata Cara Perhitungan dan Penerapan PPh Pasal 24 17. Penghitungan Pajak Akhir Tahun dan Angsuran PPh Pasal 25 18. SPT Tahunan PPh Badan
7	**PPh OP**	Orang Pribadi	PTKP, Tarif, dan Penghitungan PPh Terutang Orang Pribadi
8	**PPh Pot/Put**	Badan Dalam Negeri	1. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21 dan pengecualiannya 2. Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, Dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh Pasal 22 3. Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh Pasal 23 4. Objek pemotongan, Siapa yang wajib memotong, Dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh Pasal 4 Ayat (2)
		Orang Pribadi	1. Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas: a. Penghasilan bruto teratur b. Penghasilan bruto tidak teratur

No	Mata Ujian	Subjek	Materi
			c. Penghitungan Pasal 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang tidak kehilangan kewajiban subjektif d. Penghitungan Pasal 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang kehilangan kewajiban subjektif e. Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi f. Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja g. Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja
		Transaksi Internasional	1. Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh Pasal 26 2. Pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 26 3. Branch Profit Tax 4. Pengalihan Saham, Dividen, Royalti, Bunga
9	**PPN dan SPT PPN**	Badan Dalam Negeri	1. Objek PPN: a. Penyerahan di dalam Daerah Pabean atas: b. BKP dan non-BKP c. JKP dan non-JKP d. Kegiatan usaha / pekerjaan e. Impor BKP berwujud dan nonBKP berwujud f. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean g. Ekspor h. BKP berwujud dan nonBKP berwujud i. BKP tidak berwujud dan nonBKP tidak berwujud j. JKP dan nonJKP k. Kegiatan membangun sendiri l. Penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan 2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif: a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 1) Harga jual 2) Nilai penggantian 3) Nilai impor/ekspor 4) Nilai lain b. Tarif PPN 1) 0% ekspor 2) 12% 3) Besaran tertentu 3. Faktur Pajak: a. Fungsi Faktur Pajak b. Tata cara pengisian Faktur Pajak c. Ketentuan formal dan material Faktur Pajak d. Saat pembuatan Faktur Pajak e. Tata cara penggantian dan pembatalan faktur pajak serta pembetulan SPT f. Faktur Pajak tidak lengkap g. Nota Retur dan Nota Pembatalan 4. Pengkreditan Pajak Masukan: a. Prinsip dasar

No	Mata Ujian	Subjek	Materi
			b. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama c. Kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan d. Kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
		Orang Pribadi	1. Objek PPN: a. Penyerahan di dalam Daerah Pabean atas: 1) BKP dan non-BKP 2) JKP dan non-JKP 3) Kegiatan usaha / pekerjaan b. Impor BKP berwujud dan nonBKP berwujud c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean d. Ekspor 1) BKP berwujud dan nonBKP berwujud 2) BKP tidak berwujud dan nonBKP tidak berwujud 3) JKP dan nonJKP e. Kegiatan membangun sendiri f. Penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan"